

**RANCANGAN AKIR RENCANA KERJA
KECAMATAN KUTOREJO
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rancangan Akir Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun Anggaran 2023. Rancangan Akir Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rancangan Akir Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juli 2022

CAMAT KUTOREJO



NURYADI, SH., MM

Pembina Tk. I

NIP-19700820 199201 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	Pendahuluan 1
	1.1 Latar Belakang 1
	1.2 Landasan Hukum 2
	1.3 Maksud dan Tujuan 3
	1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu..... 8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PD 8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD... 23
	2.4 Review terhadap Rancangan Akir RKPD 25
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 33
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 34
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 34
	3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 34
	3.3 Program dan Kegiatan 35
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 40
BAB V	Penutup 47

B A B I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Kutorejo merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

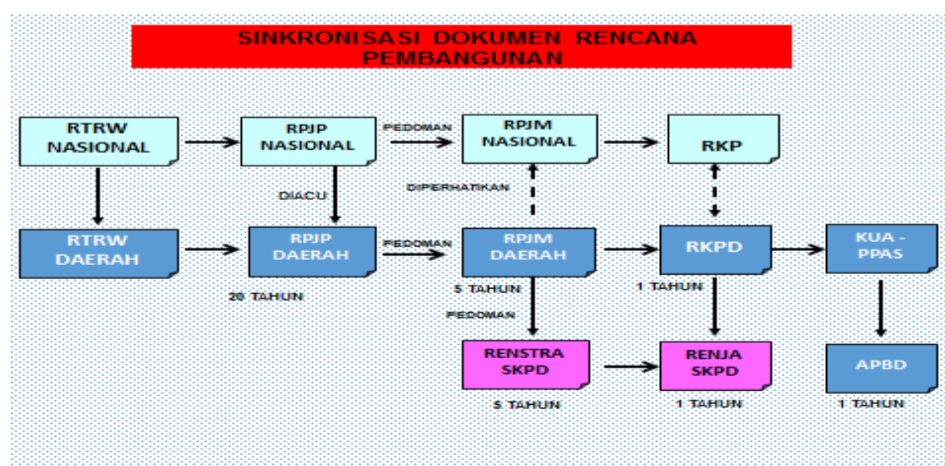
Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Kutorejo yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Kutorejo adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo Tahun 2022 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Kutorejo yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Kutorejo.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Penmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2022;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2022;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Perbup No. 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2022;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Kutorejo sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Akir Renja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang Rancangan Akir Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Akir Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kecamatan serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Akir RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akir RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Akir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Akir RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

- b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.
- c. Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

Bab V P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Akir Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akir Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Kutorejo pada tahun 2021 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

Realisasi belanja pada Kecamatan Kutorejo Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA
			(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.686.154.341,00	2.967.793.999,00	81	705.216.836,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.804.600,00	90	195.400,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	886.600,00	89	113.400,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	918.000,00	92	82.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.601.054.261,00	1.951.402.825,00	75	649.651.436,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.579.554.261	1.931.298.725	75	648.255.536,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.500.000	20.104.100	94	1.395.900,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.700.000	9.530.000	98	170.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.700.000	9.530.000	98	170.000,00
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.000.080,00	323.602.710,00	97	9.397.370,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000	6.966.750	100	33.250,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	250.000.000	245.648.650	98	4.351.440,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	18.000.000	100	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.080	11.100.000	85	1,900.080,00
	Penyediaan Bahan/Material	17.000.000	13.887.400	82	3.112.600,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.000.000	28.000.000	100	0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000.000	544.800.000	91	55.200.000,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000.000	544.800.000	91	55.200.000,00

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.700.000,00	63.182.564,00	98	1.517.436,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.200.000	30.882.564	99	317.436,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.500.000	32.300.000	96	1.200.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.700.000,00	73.471.300,00	97	2.228.700,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.500.000	28.094.900	99	405.100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.200.000	38.479.400	96	1.720.600,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	6.897.000	99	103.000,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.800.000,00	19.726.400,00	95	1.073.600,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.800.000,00	19.726.400,00	95	1.073.600,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000	4.987.000	100	13.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	15.800.000	14.739.400	93	1.060.600,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	101.000.000,00	96.856.650,00	96	4.143.350,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	101.000.000,00	96.856.650,00	96	4.143.350,00
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	41.000.000	37.202.100	91	3.797.900,00

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.000.000	59.654.550	99	345.450,00
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	42.000.000,00	41.888.500,00	99,73	111.500,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42.000.000,00	41.888.500,00	99,73	111.500,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.200.000	25.138.500	99,73	61.500,00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.800.000	16.750.000	99,73	50.000,00
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.915.600,00	50.755.500,00	99,69	160.100,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.915.600,00	50.755.500,00	99,69	160.100,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13.000.000	12.969.800	100	30.200,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.050.000	17.021.400	100	28.600,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000	4.000.000	100	0,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000	9.898.800	99	101.200,00
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.865.600	6.685.500	100	100,00
	JUMLAH	3.900.869.941,00	3.177.021.049,00	81	723.848.892,00

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sampai dengan

tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kutorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	80,56	n/a	n/a	n/a	n/a			

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	12 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85%	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	72	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	20 pegawai	n/a	n/a	n/a	n/a			

		Pelatihan								
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	100%	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	n/a	n/a	1 paket	1 paket			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	n/a	n/a	1 paket	1 paket			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	n/a	n/a	1 paket	1 paket			
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	10 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a			

7.01.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/	12 bulan	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	n/a	n/a					
7.01.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 orang	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	n/a	n/a					
7.01.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	n/a	n/a	2 unit	2 unit			

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 unit	n/a	n/a	3 unit	3 unit			
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 paket	n/a	n/a	1 paket	1 paket			
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	82%	n/a	n/a	81%	81%			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	605 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	82%	n/a	n/a	n/a	n/a			

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 Fasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga	14 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			

	n	Kemasyarakatan								
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	n/a	n/a	17 fasilitasi	17 fasilitasi	n/a			
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	n/a	n/a	17 fasilitasi	17 fasilitasi	n/a			
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	n/a	n/a	2 fasilitasi	2 fasilitasi	n/a			
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	n/a	3 fasilitasi	3 fasilitasi	n/a			
7.01.06.2.01.	Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,	n/a	4 fasilitasi	n/a	n/a				

12	Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n	Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Kutorejo. Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Kutorejo

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal		Nilai IKM
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (TC.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kutorejo
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			81	82	83	84	81		82	83	Baik
2	Nilai SAKIP Kecamatan			72	73	74	75	73		73	74	Baik
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			66	67	68	69	66		67	68	Baik

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutorejo

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Kutorejo diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebgaiian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Kutorejo

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Kutorejo bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Kutorejo yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Kutorejo;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas;

2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Kutorejo namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

- Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana.
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Kutorejo yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Kutorejo untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4. Review terhadap Rancangan Akir RKPD

Berdasarkan Rancangan Akir RKPD Tahun 2023 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2022-2026 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5 (Tabel TC. 31 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Review terhadap Rancangan Akir RKPD Tahun 2023
Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

NO	Rancangan Akir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Kutorejo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	80,56	2.739.102.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Kutorejo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	80,56	2.739.102.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100%	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat	Kec. Kutorejo	Persentase Realisasi Anggaran	82%	2.237.102.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	Persentase Realisasi Anggaran	82%	2.237.102.000	

	Daerah		Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kutorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2.237.102.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kutorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2.237.102.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	72	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	72	20.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Kutorejo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 pegawai	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Kutorejo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 pegawai	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	238.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	238.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kutorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kutorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 paket	80.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 paket	80.000.000	

			Disediakan					Disediakan			
Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Kutorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	40.000.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Kutorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	40.000.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kutorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kutorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	15.000.000		
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kutorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kutorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000		
Penyediaan Bahan/Material	Kec. Kutorejo	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	10 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Kutorejo	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	10 Paket	40.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kutorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/	12 bulan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kutorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/	12 bulan	50.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutorejo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	129.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutorejo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	129.000.000		

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	39.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	39.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 orang	89.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 orang	89.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutorejo	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutorejo	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Kutorejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Kutorejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	35.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kutorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 unit	55.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kutorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 unit	55.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 paket	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 paket	10.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Kutorejo	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	82%	30.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Kutorejo	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	82%	30.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kutorejo	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 Laporan	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kutorejo	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 Laporan	30.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Kutorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	605 Laporan	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Kutorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	605 Laporan	30.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kutorejo	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	82%	293.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kutorejo	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	82%	293.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan	Kec. Kutorejo	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan	17 Fasilitasi	293.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Kec. Kutorejo	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan	17 Fasilitasi	293.000.000	

	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kutorejo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kutorejo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	50.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kutorejo	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kutorejo	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	30.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kutorejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	56.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kutorejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	56.000.000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kutorejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	157.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kutorejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	157.000.000	
JUMLAH					3.062.102.000	JUMLAH					3.062.102.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Kutorejo melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Mojosari secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel 2.6

(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2023
Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

No.	Program/Keg / Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 paket	Sapi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kutorejo ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2026. Sasaran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi perangkat Daerah;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto pada 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		IKM Kecamatan	81	82	83	84	85
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	67	68	69	70
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	81	82	83	84	85

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kutorejo Tahun 2023 mengacu pada Tujuan Kecamatan Kutorejo yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutorejo untuk 5 tahun mendatang yaitu **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemeliharaan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kutorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi		80,56	2.739.102.000			81,46	3.360.066.697
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai		12 dokumen	15.000.000			12 dokumen	40.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	2 Dokumen	7.500.000	APBD Kab		2 Dokumen	20.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	10 Dokumen	7.500.000	APBD Kab		10 Dokumen	20.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	85%	2.237.102.000	APBD Kab		85%	2.562.566.697
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kutorejo	14 Bulan	2.237.102.000	APBD Kab		14 Bulan	2.562.566.697
	Administrasi Kepegawaian	Indeks Profesionalitas (IP) ASN	Kec. Kutorejo	72	20.000.000	APBD Kab		72	35.000.000

	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Kutorejo	27 pegawai	20.000.000	APBD Kab		27 pegawai	35.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kec. Kutorejo	100%	238.000.000	APBD Kab		100%	291.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Kutorejo	1 paket	10.000.000	APBD Kab		1 paket	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Kutorejo	1 paket	80.000.000	APBD Kab		1 paket	100.000.000
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kutorejo	12 bulan	40.000.000	APBD Kab		12 bulan	45.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Kutorejo	2 paket	15.000.000	APBD Kab		2 paket	18.000.000
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Kutorejo	1 Paket	3.000.000	APBD Kab		1 Paket	3.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	Kec. Kutorejo	10 Paket	40.000.000	APBD Kab		10 Paket	40.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/	Kec. Kutorejo	12 bulan	50.000.000	APBD Kab		12 bulan	70.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Kec. Kutorejo	100%	129.000.000	APBD Kab		100%	144.000.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 bulan	39.600.000	APBD Kab		12 bulan	45.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Kutorejo	7 orang	89.400.000	APBD Kab		7 orang	99.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kec. Kutorejo	100%	100.000.000	APBD Kab		100%	287.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Kutorejo	2 unit	35.000.000	APBD Kab		2 unit	40.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kec. Kutorejo	3 unit	55.000.000	APBD Kab		3 unit	235.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kec. Kutorejo	1 paket	10.000.000	APBD Kab		1 paket	12.500.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Kutorejo	82%	30.000.000	APBD Kab		82%	40.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Kutorejo	605 Laporan	30.000.000	APBD Kab		605 Laporan	40.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Kutorejo	605 Laporan	30.000.000	APBD Kab		605 Laporan	40.000.000

	Perizinan								
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kec. Kutorejo	82%	293.000.000	APBD Kab		82%	370.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kutorejo	17 Fasilitasi	293.000.000	APBD Kab		17 Fasilitasi	370.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kutorejo	8 Dokumen	50.000.000	APBD Kab		8 Dokumen	50.000.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kutorejo	4 Dokumen	30.000.000	APBD Kab		4 Dokumen	35.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kutorejo	6 Dokumen	56.000.000	APBD Kab		6 Dokumen	75.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kutorejo	14 Dokumen	157.000.000	APBD Kab		14 Dokumen	210.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui

tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan Organisasi Perangkat Daerah.

Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tahun 2023, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/ T B/ DAK
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi		80,56		2.739.102.000					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		L	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai		12 dokumen	Kec. Kutorejo	15.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		L	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	Kec. Kutorejo	7.500.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		L	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Dokumen	Kec. Kutorejo	7.500.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		L	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		85%	Kec. Kutorejo	2.237.102.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	Kec. Kutorejo	2.237.102.000	-	0	-	0	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat		L	Indeks Profesionalitas (IP) ASN		72	Kec.	20.000.000	-	0	-	0	-

		Daerah		Perangkat Daerah			Kutorejo						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		L Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		27 pegawai	Kec. Kutorejo	20.000.000	-	0	-	0	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		L Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran		100%	Kec. Kutorejo	238.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		L Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	Kec. Kutorejo	10.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	Kec. Kutorejo	80.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan bahan Logistik Kantor		L Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 bulan	Kec. Kutorejo	40.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		L Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	Kec. Kutorejo	15.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		L Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Paket	Kec. Kutorejo	3.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Bahan/Material		L Jumlah Paket Bahan / Material yang		10 Paket	Kec.	40.000.000	-	0	-	0	-

				Disediakan			Kutorejo						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	L	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/		12 bulan	Kec. Kutorejo	50.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	L	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100%	Kec. Kutorejo	129.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 bulan	Kec. Kutorejo	39.600.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		7 orang	Kec. Kutorejo	89.400.000	-	0	-	0	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	L	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		100%	Kec. Kutorejo	100.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	L	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 unit	Kec. Kutorejo	35.000.000	-	0	-	0	-

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		3 unit	Kec. Kutorejo	55.000.000	-	0	-	0	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 paket	Kec. Kutorejo	10.000.000	-	0	-	0	-
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		L	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan		82%	Kec. Kutorejo	30.000.000	-	0	-	0	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		L	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan		605 Laporan	Kec. Kutorejo	30.000.000	-	0	-	0	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan		L	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		605 Laporan	Kec. Kutorejo	30.000.000	-	0	-	0	-
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti		82%	Kec. Kutorejo	293.000.000	-	0	-	0	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		17 Fasilitasi	Kec. Kutorejo	293.000.000	-	0	-	0	-

		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		L	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 Dokumen	Kec. Kutorejo	50.000.000	-	0	-	0	-
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		L	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		4 Dokumen	Kec. Kutorejo	30.000.000	-	0	-	0	-
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		L	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		6 Dokumen	Kec. Kutorejo	56.000.000	-	0	-	0	-
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		L	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		14 Dokumen	Kec. Kutorejo	157.000.000	-	0	-	0	-

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kutorejo merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kutorejo selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2023, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten.

Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Kecamatan Kutorejo ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Mojokerto, Juli 2022


CAMAT KUTOREJO
NURYADI, SH., MM
Perbina Tk. I
NIP. 19700820 199201 1 002